

Analisis Program Segoro Amarto sebagai Wujud Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kota Yogyakarta

Wahyu Suroatmojo

(Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Email: wahyugadex@gmail.com

Abstract

On December 24, 2010, the Governor of Yogyakarta, Sri Sultan HB X, launched the Spirit of Mutual Cooperation Agawe Majune Ngayogyakarta (Segoro Amarto). Segoro Amarto means the spirit of Mutual Cooperation Agawe Majune Ngayogyakarta. Segoro Amarto principle is independence, social awareness, mutual help, and discipline. Segoro Amarto policy aims to enhance social justice, and make life more comfortable, prosperous and independent. This study aims to describe how the implementation of Segoro Amarto from good governance perspective. The results showed that Segoro Amarto conducted by the Government of Yogyakarta city can be regarded as one of the tangible manifestation of good governance. It is evident from the development of good governance, professionalism and development oriented public welfare. In terms of social, positive impact of the implementation of Segoro Amarto is the reduction in poverty in the city of Yogyakarta.

Keywords: *segoro amarto, good governance*

Abstrak

Pada tanggal 24 Desember 2010, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meluncurkan program Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta (Segoro Amarto). Segoro Amarto berarti Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta. Prinsip Segoro Amarto adalah kemandirian, kepedulian sosial, gotong royong, dan kedisiplinan. Kebijakan Segoro Amarto bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Segoro Amarto dengan pendekatan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Segoro Amarto yang dilakukan oleh Pemerintah kota Yogyakarta dapat dikatakan sebagai salah satu wujud nyata good governance. Hal tersebut terlihat dari semakin berkembangnya tata pemerintahan yang baik, profesionalisme dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari segi sosial kemasyarakatan, dampak positif dari pelaksanaan Segoro Amarto adalah berkurangnya tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: *segoro amarto, good governance*

PENDAHULUAN

Semangat Gotong Royong *Agawe Majune Ngayogyakarta* atau disebut SEGORO AMARTO telah diluncurkan Gubernur DIY, Sri Sultan

Hamengku Buwono X, beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 24 Desember 2010 (mediainfokota.Yogyakarta.go.id). Launcing dilakukan oleh Gubernur DIY di Kampung Bangunrejo Kelurahan Kricak

Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. Segoro Amarto merupakan suatu gerakan bersama seluruh masyarakat Yogyakarta untuk menanggulangi kemiskinan dengan lebih menekankan pada perubahan nilai yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan yang mencakup semua aspek fisik dan non fisik.

Segoro Amarto memiliki makna Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro memiliki sifat dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber daya alam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan transformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang menggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang menggambarkan kebaikan, dimana sifat masyarakat dan pemimpinnya dapat dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negara (Badan Informasi Daerah Provinsi DIY, 2011).

Jiwa atau prinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah kemandirian, kepedulian sosial, gotong royong, dan kedisiplinan. Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, Segoro Amarto juga menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan. Prinsip Pelaksanaan Segoro Amarto adalah meningkatkan rasa persatuan

dan kesatuan atas dasar kesadaran bersama untuk mewujudkan masyarakat yang kuat dan sejahtera, membangun motivasi untuk senantiasa bersemangat atas dasar nilai-nilai budaya rajin, sikap mandiri, kerjasama, dan peduli kepada sesama.

Program Segoro Amarto ini diluncurkan pada masa pemerintahan Walikota Yogyakarta dijabat oleh bapak Herry Zudianto. Tujuan gerakan tersebut adalah mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan penekanan utama perubahan nilai pada masyarakat. Menurut Herry Zudianto, selama ini upaya untuk menurunkan angka kemiskinan penduduk cenderung dilakukan secara parsial dan terkesan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya program Segoro Amarto ini maka kini kegiatan pengentasan kemiskinan berproses dari bawah ke atas (*bottom up*), sehingga masyarakatlah yang akan menyusun kebutuhankebutuhannya untuk peningkatan kesejahteraan.

Selama beberapa tahun pelaksanaan Segoro Amarto di 3 wilayah pilot project yaitu Kelurahan Sorosutan, Tegalpanggung dan Kricak, angka penurunan kemiskinan terjadi sangat drastis. Kini program Segoro Amarto mulai dikembangkan di empat kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu Kecamatan Tegalrejo, Gedong Tengen, Umbulharjo dan Mergangsan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta tahun 2011 keempat daerah tersebut adalah kantong kemiskinan terbesar dengan jumlah keluarga miskin terbesar dibanding 10 Kecamatan lain yang ada di Kota Yogyakarta. Menurut data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, jumlah keluarga miskin di Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah 17.018 atau 54.530 jiwa, turun 16,81 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2010 jumlah keluarga miskin 20.456 kepala keluarga atau 65.371 jiwa (Joglosemar, 2015).

Seiring dengan berjalannya waktu, program Segoro Amarto bukan lagi hanya sebagai program berbasis masyarakat, namun Segoro Amarto sudah menjadi bagian dari life style atau gaya hidup seluruh komponen masyarakat kota Yogyakarta, terutama para pegawai aparatur diseluruh institusi pemerintah yang ada di Kota Yogyakarta. Segoro Amarto menjadi wujud perubahan pola kerja dan tata pemerintahan yang lebih baik, berorientasi pada kesejahteraan warga masyarakat Kota Yogyakarta, menjadi jiwa dan ruh bagi pejabat pemerintah untuk bekerja sesuai dengan semangat kemandirian, kepedulian sosial, gotong royong, dan kedisiplinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*desk study*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi dengan menggunakan dokumen-dokumen dan data media, baik cetak maupun elektronik. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan konsep *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bertahun-tahun Pemerintah Indonesia begitu konsen dalam memberantas kemiskinan dengan berbagai program, misalnya memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), program beras miskin (Raskin), Program Bea Siswa, Pemberdayaan UMKM, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun upaya-upaya tersebut masih belum dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pada umumnya, bahkan angka kemiskinan cenderung meningkat. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pariwisata juga tidak luput dari masyarakat

yang hidup di garis kemiskinan. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan dengan kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan banyaknya angka pengangguran. Kemiskinan di perkotaan memiliki kompleksitas persoalan yang berbeda dengan di pedesaan.

Lambatnya pencapaian target berbagai program penanggulangan kemiskinan yang disebabkan pola penanganan yang parsial, kegiatan intervensi belum optimal dan berkelanjutan. Kurang optimalnya koordinasi instansi serta keterlibatan ketokohan masyarakat yang masih rendah semakin memperburuk keadaan. Adanya fenomena tersebut membuat Pemerintah Kota Yogyakarta mencetuskan gerakan Segoro Amarto.

Gerakan Segoro Amarto yang merupakan kepanjangan dari Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta atau semangat gotong royong menuju kemajuan Yogyakarta) adalah ide Sri Sultan HB X. Konsep ini sendiri berawal dari kunjungan Walikota Yogyakarta dan Sri Sultan HB X ke Korea untuk melihat contoh gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dikenal dengan nama *Saemaul Undong*. Melalui kunjungan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta dan Gubernur kemudian berdiskusi sehingga dicetuskannya ide gerakan Segoro Amarto untuk menanggulangi kemiskinan Kota Yogyakarta.

Gerakan ini lebih menekankan pada perubahan nilai yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan menjadi lebih baik mencakup semua aspek fisik dan non fisik. Sebagai gerakan kultural untuk menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, kepedulian, dan kemandirian di antara warga. Paradigma penanggulangan kemiskinan dibalik. Bukan "aku menerima apa?" tapi "aku bisa memberi apa?" Dalam segoro amarto dibangun jiwa kedisiplinan, kepedulian sosial, gotong royong, dan kemandirian. "Kita

peduli, kita bekerjasama, kita berdaya” (Majalah Ayodya, 2010).

Komunikasi yang dibangun dalam program ini adalah program gerakan mental yang terletak pada cara mengurangi angka kemiskinan dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat dari ranah kultural, karena kemiskinan bukan hanya persoalan dan tanggung jawab negara tetapi juga seluruh masyarakat. Partisipasi dari semua pihak tersebut diwujudkan dalam bentuk penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, tidak mengklasifikasikan masyarakat miskin sebagai obyek, namun bagian dari subyek pembangunan yang mesti diberdayakan. Proses pemberdayaan dimulai dari penghilangan stratifikasi sosial dengan bentuk kebersamaan dalam Segoro Amarto, yaitu warga yang dianggap lebih berdaya dan mampu atau sebagai pelaku usaha menstimulasi warga yang kurang berdaya sesuai kemampuan untuk bergerak maju mencapai kesejahteraan bersama. Gerakan Segoro Amarto mulai diinformasikan sejak bulan April 2010 kepada TKPK Kelurahan dan diluncurkan pada 24 Desember 2010. Proses penyampaian informasi mengenai adanya gerakan Segoro Amarto selama ini dilakukan oleh TKPK kelurahan. Narasumber dari TKPK Kota juga terjun langsung dengan mengadakan pertemuan tatap muka dengan masyarakatnya. TKPK Kota juga menggunakan beberapa media untuk menginformasikan gerakan tersebut, antara lain adalah televisi, radio, spanduk, leaflet, stiker, buku saku, surat kabar, dan media cyber.

Untuk menginformasikan gerakan Segoro Amarto memang membutuhkan strategi komunikasi yang tepat. Mengingat tujuan dari menginformasikan gerakan tersebut adalah menumbuhkan kesadaran (awareness), partisipasi warga dalam memberantas kemiskinan, dan perubahan sikap masyarakat. Jika melihat tren anak muda yang menggeluti bisnis pada industri

kreatif yang berbasis pada modal intelektual, kita pasti sependapat bahwa Yogyakarta layak menyandang sebutan Kota Kreatif yang memberikan harapan mencerahkan dalam menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Yogyakarta tampak sedang mengalami transformasi sosial yang cepat dari agraris ke semi industri, terutama industri kreatif. Orang berpindah dari pasar dan sayur-mayur ke teknologi dan informasi. Terbukti Yogyakarta berada di peringkat kedua setelah Jakarta dalam hal ketersediaan dan kemampuan SDM. Artinya, di sini banyak orang pintar dilibatkan untuk membentuk karakter hebat, kuat dan inovatif yang diharapkan tentunya mampu membawa peluang lapangan kerja. Program Segoro Amarto ini sekaligus mampu menumbuhkan sumber daya yang berasal dari partisipasi warga masyarakat kota Yogyakarta dan juga seluruh aparat Birokrasi diseluruh institusi pemerintahan kota Yogyakarta.

Modal awal untuk melaksanakan Segoro Amarto adalah dana stimulan dari Pemerintah Provinsi DIY. Pendanaan itu lebih dititikberatkan untuk sosialisasi awal ke masyarakat dan sebagai dana stimulan di tiga pilot project Segoro Amarto yaitu di Kelurahan Sorosutan, Tegalpanggung dan Kricak. Sebagai kelurahan yang menjadi proyek percontohan gerakan Segoro Amarto, maka pada Agustus 2011 Kel. Tegalpanggung menerima bantuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak lima ratus juta rupiah untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik (Antara Yogyakarta News, 2012).

Salah satu wujud pemanfaatan dana tersebut adalah pembangunan dan pengembangan perpustakaan RW yang sekaligus ruang belajar untuk anak-anak di wilayah setempat. Kondisi rumah yang sempit dan dihuni banyak orang menjadikan anak-anak tidak memiliki tempat untuk belajar, sehingga diputuskan untuk pembangunan perpustakaan yang juga

nyaman sebagai ruang belajar, Selain itu, juga disasar program kesehatan warga dengan pemberian makanan tambahan bagi warga lanjut usia atau lansia serta pemberian pelatihan keterampilan untuk warga, termasuk pengolahan sampah nonorganik. Sementara itu, untuk kegiatan fisik diwujudkan dengan pembangunan MCK umum, menara air, serta jaringan pipa air bersih. Saat ini telah terbentuk 18 kelompok pemakai air yang masing-masing melayani 20 KK pelanggan.

Dampak dari berbagai program tersebut cukup memuaskan. Pada tahun 2008 Kelurahan Tegalpanggung sempat dinyatakan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kota Yogyakarta, dan telah dilakukan berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. Pada tahun 2010 jumlah keluarga yang masuk dalam kategori miskin mencapai 666 kepala keluarga (KK), dan pada akhir tahun 2011 berkurang menjadi sekitar 560 KK (turun mencapai 18 persen dibanding tahun sebelumnya).

Gerakan Segoro Amarto dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh TKPK Kota Yogyakarta. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta adalah sebuah tim khusus yang menangani masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta. TKPK Kota kemudian membentuk secara langsung TKPK di tingkat kelurahan (TKPK-Kel) dan ini hanya ada di Kota Yogyakarta saja. Sebelum menangani Gerakan Segoro Amarto, TKPK bertugas memantau dan mengkoordinasikan segala bentuk program kemiskinan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Melalui gerakan Segoro Amarto, TKPK Kota dan TKPK-Kel mencari solusi usaha agar warga miskin dapat bekerja. TKPK juga berupaya melobi agar pegadaian dapat diajak sebagai patner kerja dalam hal meningkatkan modal usaha. Cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi supaya warga tidak terjebak pada kredit macet dan rentenir. Proses pemberdayaan

dimulai dari penghilangan stratifikasi sosial dengan bentuk kebersamaan dalam Segoro Amarto, yaitu warga yang dianggap lebih berdaya dan mampu atau sebagai pelaku usaha menstimulasi warga yang kurang berdaya sesuai kemampuan untuk bergerak maju mencapai kesejahteraan bersama.

Keseriusan menjalani perilaku good governance yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta diwujudkan dengan menelorkan program penanganan kemiskinan terpadu berlabel "Segoro Amarto" (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) mengikutkan partisipasi semua pihak tersebut diwujudkan dalam bentuk penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, tidak mengklasifikasikan masyarakat miskin sebagai obyek, namun menjadi bagian dari subyek pembangunan yang mesti diberdayakan. Kebersamaan dalam Segoro Amarto dikonsepsikan dalam proses pemberdayaan yang menghilangkan bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Warga yang lebih berdaya dan lebih mampu diharapkan dapat menstimulasi warga yang kurang berdaya sesuai kemampuan untuk bersama bergerak maju mencapai kesejahteraan.

Segoro Amarto merupakan sebuah gerakan dengan substansi paseduluran dengan basis pelaksanaan di tingkat RW yang melibatkan seluruh komponen warga. Sehingga mekanisme pelaksanaannya berada di tingkat masyarakat dan dilakukan oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang memiliki tekad, tantangan dan kebutuhan yang sama dengan basis RW. Kelompok tersebut melibatkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat seperti intelektual, pemuka masyarakat, tokoh agama, masyarakat miskin dll yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya-upaya lain menuju masyarakat madani.

Program Segoro Amarto ini juga diperkuat dengan landasan hukum yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2011

tentang Gerakan Segoro Amarto Kota Yogyakarta. Dengan adanya landasan hukum yang menaungi program ini maka segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan secara legal formal sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi siapapun yang menjalankan program ini. Keterbukaan mengenai mekanisme pelaksanaan program Segoro Amarto ini beserta seluruh kegiatan pendukungnya, mulai dari asal dana stimulus hingga penggunaannya bisa diakses langsung informasinya oleh masyarakat.

Adanya Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta yang dibentuk oleh Walikota Yogyakarta sebagai sebuah tim khusus yang menangani masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta tentunya semakin menambah efektifitas pelaksanaan program Segoro Amarto ini. TKPK Kota kemudian membentuk secara langsung TKPK di tingkat kelurahan (TKPK-Kel) sebagai unit kerja langsung yang menangani segala keperluan dan informasi terkait program ini, sehingga masyarakat akan dengan sangat mudah mengakses program Segoro Amarto.

"Yogyakarta sudah memiliki semboyan Segoro Amarto yang artinya ada semangat gotong royong di antara masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Harapannya, masyarakat bisa melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung program pembangunan melalui gerakan ini," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono di pada acara pembukaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2015 di Kecamatan Kotagede Yogyakarta.

Saat ini setelah 5 tahun program Segoro Amarto ini berjalan, program ini bisa terlihat bukan lagi hanya sebagai gerakan pengentasan kemiskinan, tapi ini sudah menjadi jiwa dalam setiap masyarakat Yogyakarta dan menjadi landasan kerja para birokrasi di Pemkot Yogyakarta. Kegiatan gotong royong di masyarakat dapat dilakukan di seluruh bidang pembangunan dan didukung oleh pemerintah agar hasilnya lebih

maksimal. Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat tersebut dilakukan di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Yogyakarta dengan melakukan berbagai kegiatan fisik dan kegiatan ekonomi, sosial atau budaya.

Setiap kelurahan akan memperoleh stimulan sebesar Rp 1,1 juta dari APBD Kota Yogyakarta yang bisa digunakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sesuai kebutuhan atau usulan masyarakat. Kegiatan bisa berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain (Antara News, 2015). Bulan bakti gotong royong diselenggarakan wujud dari konsep Segoro Amarto ini untuk menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari termasuk partisipasi dalam pembangunan di Kota Yogyakarta. Selain mencanangkan kegiatan bulan bakti gotong royong, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta juga menyerahkan berbagai bantuan hibah ke masyarakat seperti bantuan hibah untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Sebanyak 20 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menerima hibah dengan nilai total Rp 1,3 miliar.

Kini di era pemerintahan Walikota Yogyakarta yang dipimpin oleh Haryadi Suyuti, program Segoro Amarto tetap menjadi pola kebijakan mensejahterakan warga masyarakat berorientasi jangka panjang. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menargetkan bisa menekan angka kemiskinan menjadi 8,6 persen di 2016 mendatang dan maksimal 3 persen di 2025. Untuk mencapai target tersebut Pemkot Yogyakarta membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta yang mulai sejak launching proram Segoro Amarto tahun 2010 yang lalu. Tim ini dibentuk hingga tingkat kelurahan. Namun kini TKPK yang dibentuk hanya terbatas pada tiga daerah pilot project, saat

ini ada 45 tim TKPK kelurahan di Kota Yogyakarta.

Pembentukan tim sendiri dilakukan melalui Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta No. 261 tahun 2014. Tugas inti tim ini adalah melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di Yogyakarta. Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengalami penurunan sejak 2012 lalu. Jumlah penduduk miskin pada 2012 sebanyak 37.400 jiwa atau 9,49 persen. Pada 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 35.516 jiwa atau 8,82 persen (Republika News, 2015). Jumlah ini ditargetkan turun jadi 8,6 persen saja di 2016 nanti.

Sebagai pembanding, Pemkot Yogyakarta melakukan pendataan sendiri jumlah penduduk miskin di wilayahnya melalui beberapa parameter yang berbeda dengan parameter BPS. Setidaknya ada tujuh aspek yang dijadikan dasar untuk pendataan warga miskin ini. Ketujuh aspek tersebut adalah aspek pendapatan, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan sosial. Dari hasil pendataan tersebut jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta pada 2014 lalu sebanyak 60.230 jiwa menurun dibanding 2013 yang mencapai 64.699 jiwa. Penduduk miskin ini merupakan pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). Merekalah yang akan menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan yang dilakukan TKPK ini. TKPK sendiri beranggotakan beberapa SKPD terkait, tokoh masyarakat, pengusaha dan perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut.

Program Segoro Amarto telah disosialisasikan dengan baik kepada para stekholder dibawahnya. Namun sosialisasi yang begitu luas

ini pada awalnya tidak diimbangi oleh banyaknya daerah yang bisa menerima dan sebagai pelaksana program ini karena hanya terbatas pada tiga daerah pilot project di Kelurahan Sorosutan, Tegalpanggung dan Kricak. Padahal program ini cukup potensial untuk mengentaskan kemiskinan yang tinggi di Kota Yogyakarta.

Jika melihat tren anak muda yang menggeluti bisnis pada industri kreatif yang berbasis pada modal intelektual, kita pasti sependapat bahwa Yogyakarta layak menyandang sebutan Kota Kreatif yang memberikan harapan mencerahkan dalam menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Jika hal jika bisa terus dikelola dengan baik maka akan membuka banyak lapangan kerja baru sehingga penekanan angka kemiskinan dikota Yogyakarta bisa lebih cepat dari yang diharapkan terjadi, dan ini berkorelasi pada kesuksesan program Segoro Amarto yang dijalankan.

Fasilitas dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup sebagai modal awal membangun komitmen pada para stakeholder pelaksana program ini. Seharusnya ini menjadikan semangat saling peduli di kalangan warga akan meningkat drastis. Jika sikap kepedulian sudah terbangun sesuai jiwa dan semangat Segoro Amarto maka yang akan menikmati adalah seluruh komponen masyarakat Yogyakarta itu sendiri.

Program Segoro Amarto ini adalah wujud dari pelaksanaan konsep Good Governance yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan dan juga membentuk watak atau karakter para aparatur pemerintahan dikota Yogyakarta untuk disiplin, peduli, menjaga kebersamaan dan menumbuhkan kemandirian.

Program Segoro Amarto terbukti ampuh dapat menurunkan angka kemiskinan sesuai hasil survey BPS dikota Yogyakarta selama

beberapa tahun pelaksanaannya. Namun, beberapa saran dan rekomendasi kiranya dapat dilakukan untuk peningkatan kedepannya. Pertama, program Segoro Amarto ini harus terus dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta meskipun kepala pemerintahannya terus berganti. Karena ini adalah program yang mampu membentuk mental, watak dan karakter masyarakat Yogyakarta yang Sadaya Nyawiji Rila Gumreget Ambangun Diri Lan Nagari, yang berarti bersama bersatu, ikhlas, untuk membangun diri dan negara. Kedua, Segoro Amarto yang sukses dilaksanakan di kota Yogyakarta hendaknya mulai dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DIY ke seluruh Kabupaten dan Kota di DIY. Karena program ini terbukti mampu menurunkan tingkat angka kemiskinan di kota Yogyakarta. Selain itu program ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan Good Governance oleh pemerintah daerah, sehingga perlu dikembangkan untuk memperbaiki tata pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan warga masyarakat, bukan kesejahteraan golongan atau partai tertentu. Terakhir, kuantitas dana stimulus untuk program ini hendaknya ditingkatkan secara berkala, namun dikontrol dengan cermat dan lebih diarahkan sebagai modal usaha membuka lahan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sehingga tercipta lebih banyak lapangan kerja berbasis swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Antara Yogyakarta News Edisi Minggu, 26 Februari 2012.

Antara News Edisi Senin, 25 Mei 2015. Yogyakarta gencarkan gotong royong partisipasi pembangunan.

Badan Informasi Daerah Provinsi DIY Tahun 2011.

Dwiyanto, A. (2012). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

http://mediainfokota.Yogyakartakota.go.id/detail.php?berita_id=601, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

<http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/segoro-amarto-sapu-kemiskinan-74823.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

Juliartha, E. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada

Majalah Ayodya Edisi Khusus Desember 2010 diterbitkan Pemkot Yogyakarta

Republika News. Edisi Selasa, 07 April 2015. Yogya target tekan angka kemiskinan menjadi 8,6 persen di 2016.